



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 003 /BAWASLU PROV.JT-19/HK.01.01/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI SEKRETARIAT NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SE - KABUPATEN PEMALANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/K.P.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi, teknis dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tentang Penetapan Penetapan Pegawai Sekretariat Non PNS di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se - Kabupaten Pemalang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 082.A/BAWASLU PROV.JT/OT.00/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Pembentukan Sekretariat Panwas Kecamatan;
14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor 015/Bawaslu Prov.JT-19/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

Memperhatikan : Usulan Calon Pegawai Sekretariat Non PNS Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se - Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tentang Penetapan Pegawai Sekretariat Non PNS di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se - Kabupaten Pemalang Tahun 2020;

Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pegawai Sekretariat Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se - Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;

Kedua : Pegawai Sekretariat Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se - Kabupaten Pemalang sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
2. Bertanggungjawab atas tugas pokok di masing-masing bagian atau posisi;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Sekretariat Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

Keempat : Masa tugas Pegawai Sekretariat Non PNS di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sampai berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor : 900/2524/X/2019 dan 002/094/BAWASLU PROV.JT-19/RT.03.01/X/2019;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 13 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



AHMAD ZUBAEDI

NIP. 19660419 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jateng;
2. Ketua Bawaslu Prov. Jateng;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang;
4. Peringgal.

Lampiran I : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Pemalang
Nomor : 003 /BAWASLU PROV.JT-19/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 13 Januari 2020

**NAMA-NAMA PEGAWAI SEKRETARIAT NON PNS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SE - KABUPATEN PEMALANG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	NAMA	STATUS
1	MOGA	Kesit Purwandani, S.Sos.	Pelaksana Non PNS
		Aola Dliyaul Khaq, A.Md.	Pelaksana Non PNS
		A. Maezy, S.H.I.	Tenaga Pendukung
		Teti Hidayati Fauzi, S.Pd.	Tenaga Pendukung
2	PULOSARI	Sabar Priadi, S.Pd.	Pelaksana Non PNS
		Adefi Tri Hamzah, S.Pd	Pelaksana Non PNS
		Dedi Widiyanto, A.Md.	Tenaga Pendukung
		Dewi Anggraeni	Tenaga Pendukung
3	BELIK	Zaenu Mahfud Istiqom	Pelaksana Non PNS
		Rizka Putri Meilasari	Pelaksana Non PNS
		Akidatul Yusmalinda	Tenaga Pendukung
		Amirudin	Tenaga Pendukung
4	WATUKUMPUL	Mutiana, S.E.	Pelaksana Non PNS
		Arif Fajarudin, S.IP.	Pelaksana Non PNS
		Amrulloh Hafid, S.Pd.	Tenaga Pendukung
		Resti Adiningsih, S.Pd.	Tenaga Pendukung
5	BODEH	Andi Pranoto, S.Pd.	Pelaksana Non PNS
		Agung Cita Laksana, S.Pd.	Pelaksana Non PNS
		Kuniati	Tenaga Pendukung
		Siti Mundiroh	Tenaga Pendukung

NO	KECAMATAN	NAMA	STATUS
6	BANTARBOLANG	Fadli Arwani, A.Md.	Pelaksana Non PNS
		Ali Mashar, A. Ma. Pust.	Pelaksana Non PNS
		Ahmad Nurtoni, S.Pd.	Tenaga Pendukung
		Umi salamah	Tenaga Pendukung
7	RANDUDONGKAL	Atri Mumbasito, S.Sos.I.	Pelaksana Non PNS
		Anita Larasati, S.Pd.	Pelaksana Non PNS
		Rokhidin, S.Pd. AUD	Tenaga Pendukung
		Reynaldi Bagaskara Raharjo	Tenaga Pendukung
8	PEMALANG	Nur Hafid Ramadhan, S.Pd.	Pelaksana Non PNS
		Bagus Sajiwo	Pelaksana Non PNS
		Siswanto	Tenaga Pendukung
		Jarwadi	Tenaga Pendukung
9	TAMAN	Yoyo Kurniawan, S. Kom.	Pelaksana Non PNS
		Riza Aprianur, S.T.	Pelaksana Non PNS
		Afni Fauziah Nurzaen, S.Pd.	Tenaga Pendukung
		Mia Elmiana, A.Md. Kom.	Tenaga Pendukung
10	PETARUKAN	Inggar Hulwul Nurul Ain, S.Pd.	Pelaksana Non PNS
		Redy Purwanto	Pelaksana Non PNS
		Farid Makruf, S.Kom.	Tenaga Pendukung
		Nurul Isna Roikhatul Janah	Tenaga Pendukung
11	AMPELGADING	Ali Bashar, S.Pd.SD.	Pelaksana Non PNS
		Mahardika Adhi Nugroho	Pelaksana Non PNS
		Didi Heru Setiawan, A.Ma.Pust.	Tenaga Pendukung
		Heni Rahayu	Tenaga Pendukung

NO	KECAMATAN	NAMA	STATUS
12	COMAL	Nur Faiqoh, S.M.	Pelaksana Non PNS
		Sulhan Fajari	Pelaksana Non PNS
		Else Yuni Tria AK	Tenaga Pendukung
		Dwiyono	Tenaga Pendukung
13	ULUJAMI	Farid Bukhori, A.Ma.	Pelaksana Non PNS
		Lufi Yuliani, S.M.	Pelaksana Non PNS
		Subechi, A.Md.	Tenaga Pendukung
		Novita Apriliani Putri	Tenaga Pendukung
14	WARUNGPRING	Rizky Purnama Mikasasari, S.T.	Pelaksana Non PNS
		Slamet Abdul Aziz, S.Pd.	Pelaksana Non PNS
		Ika Puspita Wulandari, S.Pd.	Tenaga Pendukung
		Mohamad Alfian Rizqi, S.Pd.	Tenaga Pendukung

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT**


BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG
AHMAD ZUBAEDI
 NIP. 19660419 198903 1 007